
Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Purwodadi, Kec. Batunadua, Padang Sidempuan)

Juwita Kartika¹, Lia Puspita², Asty Andini Sandroto³, Ririani Simanullang⁴, Anggi Puspita Sari Siregar⁵

¹²³⁴⁵ UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: juwikartika2003@gmail.com, liapuspitaximia5@gmail.com, astyandinisandroto@gmail.com, ririanisimanullang@gmail.com, nggipuspita114@gmail.com

*Corresponding author

Abstract

Keywords:

Participation, Transparency, Village funds.

This research aims to see the influence of community participation and transparency on the financial management of village funds in Purwodadi village. This research is descriptive quantitative research by distributing questionnaires as a data collection method. The sample in this research was 100 respondents who were residents of Purwodadi village. The data analysis technique uses the application (statistical product and services solution) SPSS version 23. From the results of this research, there is an influence of community participation and transparency on the financial management of village funds in Purwodadi village namely, the influence of community participation and government transparency on the development and management of village funds in Purwodadi village. It is hoped that this research can become a reference for the community and village government to make it even better and also to find out the system of community roles and future performance of village government. This research can also be used as reference material for similar research and as a development for further research.

Abstrak:

Kata Kunci:

Partisipasi, Transparansi, Dana desa

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa di desa Purwodadi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menyebarkan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang merupakan masyarakat desa Purwodadi. Teknik analisis data menggunakan aplikasi (statistical product and services solution) SPSS versi 23, dari hasil penelitian ini terdapat pengaruh dari partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa di desa Purwodadi yaitu, adanya pengaruh dari partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintahan terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan dana desa di desa Purwodadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan dan referensi bagi masyarakat dan pemerintahan desa agar pengelolaan

keuangan dana desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan juga untuk mengetahui peran masyarakat dan kinerja pemerintahan desa kedepannya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian yang sejenis dan sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.

How to Cite: Author 1, Author 2. Year. Title manuscript. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis (JMEBI)*, Vol xx No. xx, DOI: xxxxx

Received : ; Revised: ; Accepted:



© Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis (JMEBI).

JMEBI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, desa diberi kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban (Undang-Undang Tentang Desa, 2014).

Pemerintah menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan dan tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap kegiatan tersebut dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertih dan disiplin anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa, 2018).

Kristo Relianus fasilitator kabupaten program nasional pemberdayaan masyarakat mengungkapkan masalah keuangan desa, pertama keterbatasan regulasi, kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Kedua, ketiadaan anggaran, tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan design dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ketiga, kurang kapasitas dan personalia, mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kepala desa dan perangkatnya, tetapi juga stakeholder untuk itu desa perlu seseorang yang mahir agar membantu

menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Keempat, pengawasan, pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan anggaran (Kristo, 2016).

Telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 kabupaten, 5 kota, dan 1006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya permasalahan utama dalam pengelolaan dana desa yakni belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi serta perencanaan juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa (Sartono, 2015).

Muslimin B. Putra (Ombudsman RI Kanior Perwakilan Sulsel) mengemukakan potensi maladministrasi dalam pengelolaan dana desa yaitu pemerintah desa tidak profesional dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDes) dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) penggunaan dana desa, realitas pencairan dana desa sering tertunda disebabkan penyusunan APBDes tahun berjalan serta laporan penggunaan dana desa tahun sebelumnya yang belum sesuai karena kepala desa dan aparat kurang profesional dalam melakukan penyusunan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

ICW (Indonesian Carruption Watch) mengungkapkan bahwa tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Tercatat, ada 17 kasus pada tahun 2015, 41 kasus tahun 2016, 96 kasus. Tahun 2017, dan 27 kasus tahun 2018 yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi di Kabupaten Kampar terdapat isu akuntabilitas yang menjadi salah satu asas pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa Lubuk Agung XIII Koto Kampar diduga selewengkan dana desa, bumdes, dan proyek dana pembangunan infrastruktur. Selain itu, di desa Gerbang Sari Kecamatan Tapung Hilir, kepala desa terbukti melakukan korupsi atas alokasi dana desa yang dikucurkan dari APBD tahun 2016 sebesar Rp 316 juta. Saat ini ada permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kampar. Pada tahap perencanaan keuangan desa, Pemerintah Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tidak melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) dalam musyawarah desa (Primayoga, 2019).

Dari kasus-kasus di atas hampir sama dengan kasus di desa Purwodadi yang dimana pengurus desa tidak membuat papan informasi di setiap kegiatan, sehingga masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan penggunaan anggaran desa. Salah satu faktor kesuksesan dalam pengelolaan keuangan dana desa di pengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan transparansi yang di sajikan. Pada penelitian (Dani Rachman dkk, 2023), (Maudiana Fahisa dkk, 2023), (Asmaul Husna dkk, 2020), (Ridha Fajri dkk, 2021), dan (Lisa Robiatu Sakdiah dkk, 2023) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan antara partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Dari kasus yang ada di Kota Padangsidempuan peneliti tertarik memilih objek di Kecamatan Batunadua desa Purwodadi karena desa Purwodadi memiliki masalah yang hampir sama dengan masalah-masalah terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mengukur partisipasi masyarakat dan transparansi. Berdasarkan uraian di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA."

LANDASAN TEORI

Pengelolaan Dana Desa

Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 mendefinisikan pengelolaan keuangan dana desa sebagai seluruh aktivitas keuangan desa termasuk dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Ada beberapa pendapat yang menyatakan pengelolaan dana desa harus dimasukkan ke dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah ada di APBDes Sugiharti & Hariani, (2021). Metode pemerintahan yang baik digunakan untuk mengelola dana desa yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 menetapkan standar transparan, akuntabel, partisipasi, dan disiplin anggaran.

Menurut peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 37 tahun 2007, pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa termasuk dalam pengelolaan dana desa. Untuk mengelola keuangan daerah, stabilitas dan transparansi dalam penerapan hukum anggaran adalah hal yang paling penting. Seluruh kegiatan yang tertuang dalam undang-undang harus

dilakukan oleh aparatur desa sebagai pengelola keuangan. Pengelolaan dana desa memiliki beberapa prinsip diantaranya adalah transparan, efektif, efisien, tertih, ekonomis dan bertanggung jawab. Pengelolaan dana desa adalah serangkaian tindakan yang mengatur dana yang dialokasikan oleh pemerintah kepada desa. Dimulai dengan pengumpulan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan proses ini (Putri & Maryono, 2022). Menurut Rifka, (2019) menyatakan bahwa indikator pengelolaan dana desa adalah pengalokasian sumber daya dan operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektivitas.

Partisipasi Masyarakat

Peraturan pemerintahan nomor 45 tahun 2017 menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam operasi pemerintahan daerah diperlukan. Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai partisipasi masyarakat saat membuat keputusan melalui lembaga yang dapat mewakili aspirasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung (L, 2018).

Masyarakat desa harus terlibat dalam mengevaluasi pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel Kartika, (2012). Keterlibatan individu atau kelompok dalam mendukung program kerja untuk menyelesaikan suatu kegiatan disebut kontribusi masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat dapat dicapai dengan menggunakan semua kemampuan anda dan berinisiatif. Dengan demikian, setiap kegiatan yang berlangsung dapat membantu mencapai tujuan (Periansya , sopiyan, A, 2020).

Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka dengan memberi orang hak untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat menjalankan operasinya sesuai dengan tujuan organisasi dan mengatasi masalah untuk mengkritik dan menyampaikan saran. Menurut Atiningsih & Ningtyas, (2019) menyatakan bahwa indikator partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa, mengusulkan rencana anggaran, terlibat dalam rapat paripurna, terlibat mengawasi dan melaporkan, memberikan penilaian pelaksanaan anggaran dan memberikan penghargaan.

Transparansi

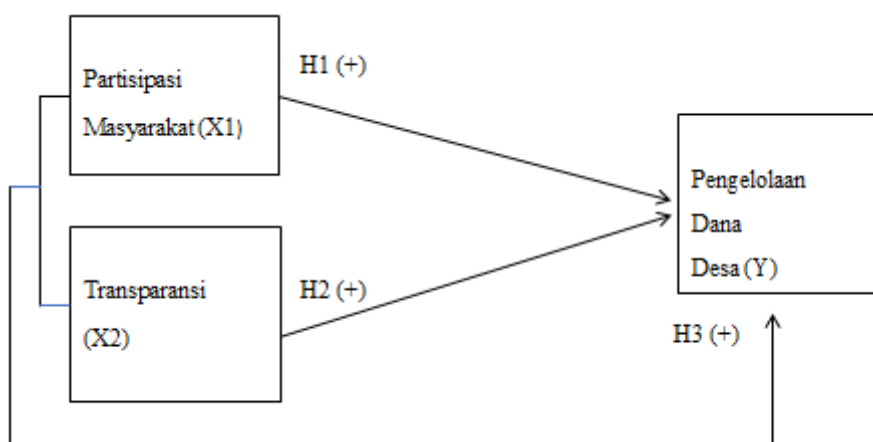
Transparansi adalah pemberian layanan publik yang harus tersedia secara memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat yang membutuhkan dan dapat diakses dengan mudah Sugiharti & Hariani, (2021). Transparansi tercipta atas dasar

kebebasan dalam memperoleh informasi yang masyarakat butuhkan. Transparansi adalah ciri pemerintahan yang baik, dimana memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan.

Transparansi dapat diartikan bahwa aparaturnya desa dalam mengelola dana desa dilakukan dengan terbuka, karena dana desa juga merupakan hak dan milik masyarakat yang harus diketahui masyarakat desa. Penerapan transparansi ditujukan untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya desa Sofyani & Tahar, (2021). Transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa dimaksudkan untuk menjadikan pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat, meningkatkan manajemen pemerintahan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, dan mengurangi kemungkinan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurut pasal 4 Ayat 7 pedoman menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, transparansi memungkinkan orang-orang di masyarakat memahami dan mendapatkan informasi mengenai keuangan daerah. Transparansi memungkinkan setiap orang untuk mengetahui bagaimana pemerintah beroperasi, seperti kegiatan yang dilakukan pemerintah. Menurut Lara, (2022) menyatakan bahwa indikator transparansi adalah ketersediaan sistem informasi, aksesibilitas terhadap alokasi dana desa, publikasi laporan keuangan dan ketersediaan informasi kinerja.

Kerangka Berpikir



Sumber : Data di olah 2023

H1 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

H2 : Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

H3 : Partisipasi masyarakat dan transparansi berpengaruh simultan terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Dimana penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kuantitatif. Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yaitu variabel independent (partisipasi masyarakat dan transparansi) dan variabel dependent (pengelolaan keuangan dana desa) Teknik analisis data menggunakan aplikasi (*statistical product and service solutions*) SPSS versi 23.

Tabel 1. Variabel dan Indikator

No	Variabel	Indikator
1	Partisipasi Masyarakat (x1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa. 2. Mengusulkan rencana anggaran. 3. Terlibat dalam rapat paripurna. 4. Terlibat mengawasi dan melaporkan. 5. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran. 6. Memberikan penghargaan.
2	Transparansi (x2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sistim informasi. 2. Akseibilitas terhadap alokasi dana desa. 3. Publikasi laporan keuangan. 4. Ketersediaan informasi kinerja.
3	Pengelolaan Dana Desa (y1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalokasian sumber daya. 2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Batunadua dengan jumlah sampel sebanyak 100 masyarakat dari 66.831 masyarakat Kecamatan Batunadua. Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel yaitu dengan menggunakan rumus slovin. Menurut Chandrarin (2018), rumus slovin yaitu

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

Diketahui :

$$N = 66.831$$

$$e = 10\% = 0,1$$

ditanya ?

$$n = \dots?$$

Perhitungan sampel dengan rumus slovin adalah sebagai berikut

$$n = \frac{N}{1 + e^2}$$

$$n = \frac{66.831}{1 + (66.831 \cdot 0,1^2)}$$

$$n = \frac{66.831}{1 + (668,31)}$$

$$n = \frac{66.831}{669,31}$$

$$n = 99,85$$

Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 99 yang jika dibulatkan menjadi 100 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel sumber data dengan menetapkan pertimbangan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Instrumen penelitian ini menggunakan skala likert.

Tabel 2. Skala Likert

Penilaian	Skor
Tidak Setuju Sekali (TSS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Setuju (S)	3
Setuju Sekali (SS)	4
Sangat Setuju Sekali (SSS)	5

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah dengan aplikasi SPSS versi 23 sebagai alat hitung. Analisis data yang digunakan yaitu uji statistic deskriptif, uji instrument data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi). Kemudian dilanjutkan dengan hasil akhir dengan uji regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji koefisien determinan, uji simultan dan uji parsial).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Pengelolaan Keuangan Dana Desa

X₁ = Partisipasi Masyarakat

X₂ = Transparansi

a = Konstanta

b₁-b₂ = Koefisien regresi

e = Kemungkinan error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan variabel pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Terdapat tiga variabel nominal (kategoris) meliputi usia, pekerjaan, dan jenjang pendidikan. Responden terdiri dari 100 orang. Usia responden dikategorikan menjadi 4 kelompok: 18-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun, dan >36 tahun. Sebagian besar responden 62 % berusia 18-25 tahun, 25% berusia 26-30 tahun, 8% berusia 31-35 tahun, dan 5% berusia >36 tahun. Pada kategori pekerjaan terdapat 5 kelompok: Petani, Pedagang PNS, Wiraswasta, Ibu rumah tangga dan lainnya. Terdapat 51% sebagai Petani, 5% sebagai pedagang, 23% sebagai Wiraswasta, 9% sebagai PNS, 6% sebagai Ibu rumah tangga dan 6% untuk kategori lainnya. Pada kategori jenjang pendidikan terdapat 4 kelompok: SD-SMA, S1, S2, S3 dan lainnya. Terdapat 62% jenjang SD-SMA, 17% jenjang S1, 2% S2, dan 1% jenjang S3 dan 18% untuk kategori jenjang lainnya.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3 Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Totalx1	100	13	30	23.70	5.165
Totalx2	100	8	20	16.21	3.331
Totally	100	4	10	8.27	1.663
Valid N (listwise)	100				

Hasil uji analisis statistik deskriptif dijelaskan bahwa dari 100 pengamatan, nilai mean partisipasi masyarakat (X1), sebesar 23.70, minimum 13 dan nilai maximum 30. Pada variabel transparansi (X2) nilai mean sebesar 16.21, minimum 8 dan maximum 20. Pada variabel pengelolaan keuangan dana desa nilai mean 8.27, minimum 4 dan nilai maximum 10.

Uji Validitas

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Partisipasi Masyarakat (X1)	X1.1	1	0,1638	Valid
	X1.2	0,746	0,1638	Valid
	X1.3	0,705	0,1638	Valid
	X1.4	0,601	0,1638	Valid
	X1.5	0,545	0,1638	Valid
	X1.6	0,543	0,1638	Valid
Transparansi (X2)	X2.1	1	0,1638	Valid
	X2.2	0,545	0,1638	Valid
	X2.3	0,581	0,1638	Valid
	X2.4	0,489	0,1638	Valid
Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)	Y1.1	1	0,1638	Valid
	Y1.2	0,677	0,1638	Valid

Diketahui hasil uji validitas di atas dapat dijelaskan bahwa nilai r_{hitung} > r_{tabel} berdasarkan uji signifikan 0.05 artinya item-item indikator tersebut dinyatakan valid.

Uji Reabilitas

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Partisipasi masyarakat	0,907	Reliabel
Transparansi	0,860	Reliabel
Pengelolaan keuangan dana desa	0,807	Reliabel

Diketahui hasil uji realibilitas di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh nilai Cronbach's Alpa > 0.80 artinya variabel tersebut dinyatakan realibel.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,06828070
Most Extreme Differences	Absolute	,106
	Positive	,106
	Negative	-,087
Test Statistic		,106
Asymp. Sig. (2-tailed)		,007 ^c

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa signifikan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,007 > 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi tidak normal.

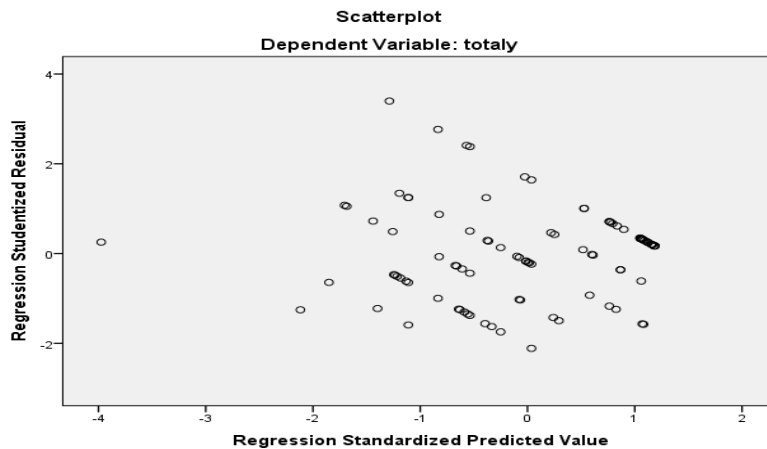
b. Uji Multikolinearitas

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Partisipasi Masyarakat	0,349	2,865	Bebas multikolinearitas
Transparansi	0,349	2,865	Bebas multikolinearitas

Diketahui nilai Tolerance untuk variabel partisipasi masyarakat (x1) adalah $0,349 > 0,10$. Sementara nilai Tolerance untuk variabel transparansi (x2) adalah $0,349 < 0,10$. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada variabel penelitian ini.

a. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1
Hasil uji heteroskedastisitas

Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu. Titik-titik menyebar diatas dan dibawah sumbu Y dan angka 0 jadi, dapat dikatakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

2. Uji Linear Berganda

Tabel 8 Hasil Uji Linear Berganda

Variabel	Koefisien regresi	t _{hitung}	Sig
Konstanta	1,547	2,294	0,024
X1	0,14	0,725	0,470
X2	0,39	12,537	0,000
F _{hitung} = 79,424			
R Square = 0,621			

Interprestasi :

1. Nilai konstan sebesar (1,547) satuan, dan bernilai (+) menunjukkan jika semua variabel Partisipasi masyarakat dan transparansi bernilai 0% maka nilai variabel pengelolaan keuangan dana desa sebesar (1,547)

2. Nilai koefisien sebesar (0,14) satuan dan bernilai (+) menunjukkan bahwa jika Partisipasi masyarakat mengalami kenaikan 1% maka variabel Pengetahuan mengalami kenaikan sebesar (0,14) satuan, Variabel lain dinyatakan konstan.
3. Nilai koefisien sebesar (0,39) satuan dan bernilai (+) menunjukkan bahwa jika Transparansi mengalami kenaikan 1% maka variabel Transparansi mengalami peningkatan sebesar (0, 39) satuan, Variabel lain dinyatakan konstan

Uji statistic

a. Uji koefisien determinasi (R2)

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,788 ^a	,621	,613	1,079

Berdasarkan hasil uji determinasi pada tabel tersebut maka diperoleh nilai *adjusted R-square* sebesar 0,613 (61,3%). Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independent dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 61,3%, sedangkan sisanya sebesar 38,7% (1-0,613) dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian.

b. Uji Parsial (t)

Tabel 10 Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,547	,674		2,294	,024
	Partisipasi masyarakat (X1)	,014	,020	,045	,725	,470
	Transparansi (X2)	,392	,031	,785	12,537	,000

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dilihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Berdasarkan nilai signifikansi partisipasi masyarakat sebesar $0,470 < 0,05$ artinya H_1 ditolak. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh partisipasi masyarakat desa Purwodadi terhadap

pengelolaan keuangan dana desa.

Nilai variabel dilihat dari nilai signifikansi transparansi sebesar $0,000 < 0,05$ artinya H_2 diterima. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

c. Uji Simultan (F)

Tabel 11 Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	185,019	2	92,509	79,424	,000 ^b
	Residual	112,981	97	1,165		
	Total	298,000	99			

Dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 79,424. Sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan, dan variabel independen yang meliputi *participation* dan *transparency* memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

PPEMBAHASAN DAN PENELITIAN

1. Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dana desa

T_{hitung} partisipasi masyarakat sebesar 0,725 t_{tabel} sebesar 1,66023 ($t_{hitung} < t_{tabel}$) dan signifikan $0,470 > 0,05$. Dapat disimpulkan H_1 ditolak. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh partisipasi masyarakat desa Purwodadi terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Hal ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat maka tidak akan mempengaruhi pengelolaan keuangan dana desa. Hal tersebut terjadi karena peran masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan maupun dalam realisasi tentang pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku wakil dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dibatasi. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Yanto & Aqfir, 2021) dan (Nita Maina dkk, 2022) yang menyatakan bahwa masyarakat kurang mengetahui tentang pembangunan karena tidak adanya akses informasi dan adanya praktik KKN aparat desa yang membuat pengelolaan dana desa tidak efektif.

2. Transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa

T_{hitung} transparansi sebesar 12,537 t_{tabel} sebesar 1,66023 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan signifikan transparansi sebesar $0,000 < 0,05$ artinya H_2 diterima. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Artinya semakin tinggi transparansi yang terjadi maka semakin tinggi juga tingkat efektivitas pengelolaan dana desa pada desa Purwodadi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Lisa Robiatu Sakdiah dkk, 2023), (Putra & Rasmini, 2019), (Ramadhani & Yuliati, 2021), dan (Umami & Nurodin, 2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan keterbukaan pemerintah desa terhadap dana desa dilaksanakan dengan maksimal. Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya, diantaranya memberikan akses terkait keuangan desa melalui website maupun papan pengumuman, diadakannya musrenbang, dan sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana desa. Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa di desa Purwodadi. Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teori dan pengelolaan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan yaitu, tidak terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dana desa dan terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan wawasan dan pengetahuan untuk peneliti berikutnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, transparansi dan pengelolaan keuangan dana desa, peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk dapat menggunakan faktor lain yang belum diungkap dalam dalam penelitian ini.

Bagi pemerintah desa Purwodadi diharapkan penelitian ini dapat menjadikan bahan evaluasi atau pertimbangan untuk lebih meningkatkan transparansi dan kerjasama yang lebih baik dengan dengan aparat desa lainnya sehingga proses dan

pertanggungjawaban suatu kebijakan yang telah diambil dapat diawasi secara terus menerus, dan diharapkan pemerintah desa juga meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi dengan media informasi atau lembaga non pemerintah lainnya sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana desa yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Bagi masyarakat diharapkan membangun kesadaran dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desanya. Menyampaikan aspirasi atau masukan yang sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, yaitu melalui Badan Penyelidik Daerah (BPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Kristo, R. (2016). Masalah Pengeloaan Keuangan Desa. Tribunnews.Com.
<http://kupang.tribunnews.com/2016/04/08/masalah-pengelolaan-keuangan-desa>,
- L, M. (2018). Pengaruh Partisipasi masyarakat, kompetensi aparat dan sistem pengendalian intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Pemodesari. JOM FEB Riau University, 1(1), 1–13.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa, Pub. L. No. 20 (2018).
- Periansya, Sopiyan, A, R. (2020). Dampak Kompetensi dan Partisipasi masyarakat Terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa kecamatan rambutan banyuasin. RRiset Terapan Akuntansi, vol.4 no.1, 12–19.
- Primayoga, E. (2019). Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut>
- Sartono. (2015). Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah. Anggota BAKN DPR RI. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah>
- Undang-Undang tentang desa, Pub. L. No. 6 (2014).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm>